

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang beragam, beragam mulai dari suku, budaya, agama hingga bahasa. Keberagaman ini dicatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) secara kuantitatif bernilai total 1.340 suku, 718 bahasa, dengan 6 agama yang diakui serta berbagai adat dan kebudayaan yang mengikutinya. Keberagaman ini melahirkan Indonesia yang multikultural, namun sayangnya kekayaan ini juga menjadikan Indonesia sangat rentan akan timbulnya konflik (Ganes Harpendya et al., 2022)

Hal tersebut tegaskan oleh Kymlicka dalam (Fathur Rahman et al., 2020), yang mana ia memiliki pandangan bahwa akan sulit untuk suatu negara dengan keberagaman untuk tetap dalam persatuan, sebelum masyarakatnya dapat menghargai perbedaan dan ingin hidup di dalamnya. Hal ini menyebabkan penanaman nilai multikulturalisme dalam masyarakat menjadi menjadi hal yang penting dan dapat diciptakan melalui dialog antar budaya (Hazani, 2019). Multikulturalisme merupakan suatu kesadaran, dan pemahaman oleh individu terhadap pluralisme atau perbedaan dalam setiap individu (Zarbaliyev, 2017).

Alasannya dalam (Fathur Rahman et al., 2020) disebutkan karena adanya sikap dan perasaan cinta kedaerahan yang berlebihan (Fanatik), hingga menganggap yang dianut merupakan yang paling benar (superior). Perasaan superior ini yang kemudian dapat mengarah kepada perilaku etnosentrisme oleh individu.

Etnosentrisme merupakan sebuah pandangan di mana nilai budaya lain tidak lebih baik daripada budaya sendiri. Pandangan ini didasarkan pada ukuran melalui pandangan dan kacamata budaya serta identitas sosial budaya seorang individu (Nanda & Richard, 2007).

Di Indonesia, konflik berbau SARA (Suku Agama, Ras dan Antar Golongan) masih menjadi polemik yang belum terpecahkan hingga saat ini. Konflik ini tidak hanya menembus lapisan umum masyarakat, tetapi sampai merasuk ke dunia pendidikan. Perbuatan seperti Perundungan dan diskriminasi yang berlandaskan SARA masih menjadi peristiwa yang kerap terjadi mulai dari bangku sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi.

Di kalangan siswa, beberapa kasus yang pernah muncul seperti kasus perundungan yang terjadi pada siswa kelas dua di SDN Pekayon 16 Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dirinya sering mendapatkan perilaku kasar baik secara verbal maupun fisik sebab dirinya dianggap bukan pribumi (Kompas.com, 2017). Selain kasus berlatarbelakang rasial, kasus berlatar belakang agama juga kerap terjadi di sejumlah sekolah berupa pemaksaan penggunaan hijab pada siswa penganut agama berbeda. Peristiwa tersebut berujung pada perundungan yang tidak hanya dilakukan oleh sesama siswa, tetapi juga turut dilakukan oleh pihak guru dan kepala sekolah. Perundungan itu dirasakan oleh siswa kelas dua SD, dirinya sering di sebut kafir, di caci hingga dipukuli (Warkota.com, 2023).

Semakin tinggi pendidikan seseorang tidak menjamin pemahaman yang tinggi pula akan pemahaman nilai multikulturalisme. Kasus rasisme masih sering mewarnai

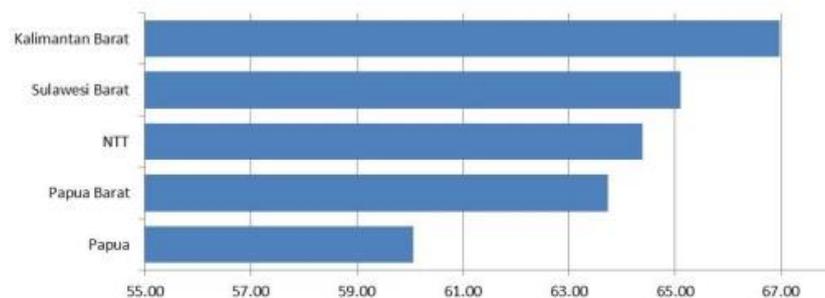
dunia pendidikan di Indonesia, khususnya pada mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di kota lain. Rasisme merupakan ujaran kasar dan makian serta perilaku diskriminasi yang terjadi pada suatu kelompok ras tertentu (Nurdin, Endang, 2020).

Salah satu kasus rasisme pada mahasiswa Papua yang berujung pada kerusuhan terjadi di Surabaya, pada 2019 lalu. Peristiwa tersebut bermula dari Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang mendatangi asrama mahasiswa Papua dengan seruan rasisme tak pantas, buntut dugaan penghinaan bendera merah putih. Peristiwa itu berakhir melibatkan aparat keamanan polisi dan penangkapan 43 mahasiswa Papua. Ujung dari peristiwa tersebut membawa dampak yang cukup pelik bagi Indonesia, sebab banyak amarah dan ujuk rasa yang muncul di beberapa daerah setelah terjadinya peristiwa tersebut, mengakibatkan beberapa bangunan dan fasilitas umum rusak dan terbakar (Katharina, 2019). Peristiwa yang pernah terjadi 2019 itu kemudian menjadi isu yang terus di orasikan dalam gerakan #PapuaLivesMatter yang terinspirasi dari gerakan #BlackLivesMatter di Amerika Serikat (Human Right Watch, 2024).

Melihat serangkaian kasus tersebut, maka akan sulit rasanya bagi anggota suatu kelompok budaya untuk dapat tinggal dan berpindah ke wilayah lain di Indonesia yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan mereka. Sebab selain harus beradaptasi, mereka harus menghadapi kemungkinan buruk dan berbagai peristiwa berbau intoleran yang mungkin terjadi. Padahal, ketimpangan akses pendidikan di Indonesia masih menjadi isu yang belum terpecahkan, sehingga mau tidak mau untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik para pelajar ini harus

berpindah ke kota dengan akses pendidikan yang lebih memadai dan beradaptasi di lingkungan baru.

Isu-isu terkait SARA (mencakup intoleransi dan rasisme) ini disebutkan oleh Van Dijk dalam (Juanda, 2024) merupakan sebuah ketimpangan yang berkaitan satu sama lain. Ketimpangan pada berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan juga merupakan tolak ukur dalam melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah (Nisa & Lindasari, 2020). Dalam kasus ini, diketahui bahwa provinsi Papua masih menjadi provinsi dengan IPM terendah di Indonesia per 2018.



Gambar 1. Provinsi dengan IPM Terendah tahun 2018
Sumber : Data BPS

Tidak hanya melalui skala IPM, Ketimpangan pendidikan juga dilihat melalui data statistik lain yang di himpun oleh BPS, dan menunjukkan perbedaan signifikan pada penyelesaian pendidikan di Indonesia. Provinsi Papua menempati posisi terendah dengan persentase 39.50% dari penduduknya yang menyelesaikan pendidikan hingga ke perguruan tinggi, sementara sebaliknya, Provinsi Yogyakarta berada di persentase 89.69%. Adapun permasalahan kesenjangan pendidikan dalam

negeri ini dipengaruhi oleh beberapa hambatan dan faktor yang meliputi geografis, sosial dan ekonomi (Meravigliosi, 2023)

Menghadapi kompleksitas multikultural di Indonesia menjadi tanggung jawab dan tantangan bagi masyarakat, terlebih pada pemerintah yang memiliki pengaruh kuat dalam menjaga dan mencegah perpecahan. Menanggapi polemik antar budaya dan ketimpangan terlebih pada sektor pendidikan, presiden ke tujuh Indonesia, Joko Widodo mendirikan program AMN sebagai upaya penanaman nilai multikulturalisme melalui dialog antar budaya dan pemberian akses pendidikan pada mahasiswa nusantara.

AMN (Asrama Mahasiswa Nusantara) merupakan program penyediaan beasiswa serta hunian asrama kepada mahasiswa nusantara yang memiliki keterbatasan akses pada pendidikan, ter-khususkan kepada provinsi yang terdampak ketimpangan di sektor pendidikan. Program ini bermula saat pertemuan presiden Jokowi bersama 61 tokoh Papua ketika melakukan kunjungan ke istana negara. Usulan mengenai AMN hadir sebab banyaknya gesekan antar mahasiswa di sejumlah kota pendidikan di Indonesia, terlebih banyak asrama yang hanya dihuni oleh sekelompok suku tertentu dan bersifat homogen.

Dengan tujuan mempersatukan mahasiswa nusantara dan menanamkan nilai multikulturalisme melalui dialog antar budaya, maka didirikanlah AMN (Asrama Mahasiswa Nusantara) ini pada tahun 2022. Program ini mengutamakan mahasiswa yang berasal dari daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) untuk menjawab permasalahan ketimpangan dan aksesibilitas pendidikan (Putranto, 2022).

Asrama ini menampung sebanyak 505 mahasiswa nusantara dengan penyebaran empat perguruan tinggi di Surabaya, meliputi UPN “Veteran” Jawa Timur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Surabaya. Mahasiswa ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dimana setiap provinsi di Indonesia memiliki setidaknya satu mahasiswa yang menerima beasiswa AMN, dengan penghuni terbanyak berasal dari provinsi Jawa timur, Papua dan Sumatera Utara, sementara penghuni paling sedikit berasal dari provinsi Maluku dan Maluku Utara. Oleh karena itu keberagaman identitas dan kebudayaan yang ada di Indonesia membaur di Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya. Adapun data penghuni asrama sebagai berikut



Gambar 2. Profil Penghuni AMN
Sumber : Website resmi AMN Surabaya

Implementasi program ini pertama kali diwujudkan di kota Surabaya tepatnya di Jalan Jemur Andayani No. 1. Tidak berhenti di Surabaya, program ini

direncanakan akan berlanjut di kota pendidikan lainnya seperti, Makassar, Manado, DKI Jakarta, Bantul DIY dan Malang (Laksono, 2022).

Selama mendapati program AMN, mahasiswa penerimanya diwajibkan untuk tinggal di asrama dalam kurun waktu dua tahun, dan aktif di berbagai aktivitas bersama yang dijalankan oleh pengurus. Sebagaimana visinya, untuk menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) berkualitas, berintegritas dan berkarakter kebangsaan, penanaman nilai- nilai tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan pengembangan yang ada, seperti kegiatan keagamaan, kelas intensif, serta kegiatan bonding antar sesama penghuni asrama. Oleh karena itu dalam program ini mahasiswa dipastikan untuk berbaur dan berinteraksi dengan penghuni lainnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan toleransi dan nilai multikulturalisme pada seluruh mahasiswanya.

Proses tersebut menjadi tantangan bagi seluruh mahasiswa AMN yang rentan pada kesalahpahaman dan konflik kebudayaan seperti stereotip yang melekat, hingga pandangan terhadap norma dan kebiasaan, untuk mahasiswa dapat beradaptasi dan tinggal dengan nyaman di AMN. Berbeda budaya, berbeda pula dalam ekspresi, gagasan, kebiasaan terlebih dalam menyampaikan ide, dan berkomunikasi sehari-harinya (Suryani, 2013). Maka tidak jarang, permasalahan-permasalahan yang berasal dari kebiasaan suatu individu yang tidak dapat diterima oleh individu lain, mengakibatkan gesekan dalam kehidupan asrama.

Hadirnya fenomena ini menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana penghuni Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) dalam melakukan

interaksi antar budaya dan beradaptasi di lingkungan baru yang multikultural. Alih-alih harus beradaptasi dengan satu kebudayaan, mahasiswa harus beradaptasi dengan lingkungan yang sangat beragam di AMN. Oleh sebab itu, menjadi menarik dan penting untuk diketahui bagaimana proses komunikasi antar budaya serta perjalanan adaptasi Mahasiswa AMN di Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya.

Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dengan judul “Mahasiswa, Asrama, dan Komunikasi Antar Budaya (Studi Deskriptif Kualitatif Adaptasi Dalam Komunikasi Antar Budaya Mahasiswa di Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya)” yang mana penelitian ini berfokus pada proses adaptasi dalam komunikasi antar budaya mahasiswa penerima beasiswa AMN selama tinggal di Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, Adapun permasalahan untuk dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana proses adaptasi dalam komunikasi antar budaya mahasiswa di Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka didapatkan bahwa tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses adaptasi dalam komunikasi antar budaya mahasiswa di Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu serta pemikiran kepada pengembangan ilmu komunikasi khususnya dalam ruang komunikasi antar budaya. Secara khusus, adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dan referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya mengenai pola komunikasi khususnya dalam ruang komunikasi antar budaya terlebih pada ruang lingkup asrama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pembaca dan bagi mereka yang tertarik dan sering melakukan komunikasi antar budaya khususnya pada ras, dan etnik yang berbeda untuk memudahkan dalam proses komunikasi dan interaksi budaya yang lebih efektif. Lebih khusus melalui penelitian ini diharapkan dapat terbentuknya pemahaman atas realitas sosial yang terjadi dalam komunikasi antar budaya yang kemudian dapat menambah jiwa multikulturalisme dalam bangsa.